

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
NO. DAFTAR 0420/PER-UMP/08
ANGKAT 27-09-08

**ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR
DITEPI JALAN UMUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



OLEH :

NAMA : Moch. Agus Tria Subri
NIM : 22 2003 199

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2008**



**ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR
DITEPI JAJAN UMUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH :

NAMA : Moch. Agus Tria Subri

NIM : 22 2003 199

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2008**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch. Agus Tria Subri

NIM : 22 2003 199

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Juli 2008

Penulis,



Moch. Agus Tria Subri



PERSEMBAHAN DAN MOTTO

MOTTO : *Kedisiplinan dan kerja keras serta berdoa*

merupakan salah satu kunci utama keberhasilan

Ku Persembahkan Kepada:

- ♥ **Kedua Orang Tuaku**
- ♥ **Saudara-Saudaraku**
- ♥ **Adikku Tersayang (Dilla)**
- ♥ **Teman-Teman Saperjuangan**
- ♥ **Almarinerku**





PRAKATA

Assalammualaikum Wr. Wb.

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, serta salawat dan syukur penulis sampaikan kepada junjungan nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Faktor Penghambat Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang.”

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada orang tuaku, saudaraku yang telah mendidik, membiyai, mendoakan dan memberikan dorongan semangat kepada penulis dan penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mizan SE. M.Si. yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan jelas dalam menyelesaikan skripsi ini. selain itu saya sampaikan juga ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang:

1. Bapak H. M. Idris, S.E., M.Si. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati
2. Bapak Drs. H. Rosyadi, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan Karyawan/Karayawati
3. Bapak Drs. Sunardi, S.E., M..Si. selaku ketua jurusan akuntansi fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang

4. Bapak M. Irfan Tarmizi, S.E., Ak, M.BA. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Hj. Ida Zuraidah, S.E.Ak. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan dorongan dan motivasi serta bekal ilmu kepada penulis selama belajar di perguruan tinggi
6. Pimpinan beserta staf dan karyawan/karyawati dinas perhubungan kota Palembang
7. Teman-teman angkatan 2003 dan teman-teman KKN Posko Teluk Lubuk
8. Adik-adik tingkat, Erwin, Azis, Azhy, Alex, Masyuri, Kasful yang telah memberi motivasi dan adik ku Dila Fardila
9. Rekan-rekan di Lembaga BEM, HMJ, DPM dan PK-IMM FE
10. Seluruh Sepupu-sepupu ku yang telah memberi motivasi
11. Semua pihak yang tak bisa disebutkan satu persatu

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati menulis banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. semoga amal ibadah yang di lakukan mendapat balasan dari-nya Amin.

Palembang, Juli 2008

Moch. Agus Tria Subri

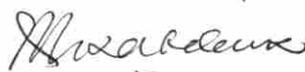
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul : ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT
PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) DI KOTA PALEMBANG**

**Nama : Moch. Agus tria Subri
NIM : 22 2003 199
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Pemerintah**

**Diterima dan Disyahkan
Pada tanggal**

Pembimbing



(Mizan S.E. M. Si.)

**Mengetahui
Dekan
u.b. Ketua Jurusan Akuntansi**



(Drs. Sunardi S.E. M.Si.)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSYARATAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGKAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya	7
B. Landasan Teori	8
1. Retribusi Daerah	8

2. Pengertian Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	8
3. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	10
4. Faktor Penghambat	11
5. Tujuan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	12
6. Pengertian Tarif	12
7. Struktur dan besarnya tariff	12
8. Objek subyek dan jenis-jenis retribusi daerah	12

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian	19
B. Tempat Penelitian	20
C. Operasional Variabel	20
D. Data yang digunakan	21
E. Teknik Pengumpulan data	22
F. Analisis dan teknik analisis	23

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian	24
1. Gambaran Singkat Dinas Perhubungan Kota Palembang ..	24
2. Tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Palembang	24
3. Kewenangan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Palembang	24



4. Struktur organisasi dan pembagian tugas.....	28
a. Struktur Dinas Perhubungan Kota Palembang	28
b. Pembagian Tugas	32
5. Pengelolaan Retribusi Parkir	44
6. Data Target dan Realisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.....	45
7. Tarif Retribusi Parkir Pada Kota Palembang	46
B. Pembahasan	46
a. Analisis Faktor Penghambat Secara Langsung Yang dilakukan Oleh Dinas Perhubungan.....	48
b. Analisis Faktor Penghambat Secara Tidak Langsung Yang dilakukan Dinas Perhubungan	52

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Target dan Realisasi Retrubusi Komulatif Parkir di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Pemerintahan Kota Palembang Tahun 2002-2007	5
Tabel III.1 Operasional Variabel	20
Tabel IV.1 Target dan Realisasi Retrubusi Komulatif Parkir di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Pemerintahan Kota Palembang Tahun 2002-2007	45

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Palembang	31



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Selesai Riset dari Perusahaan
- Lampiran 2 Fotocopy Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 Fotocopy Aktivitas Usulan Penelitian
- Lampiran 4 Fotocopy Sertifikat Mengaji
- Lampiran 5 Biodata Penulis

ABSTRAK

Moch. Agus Tria Subri /222003199/2008/Analisis Faktor Penghambat Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi hambatan dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum.

Penelitian ini dilakukan pada dinas perhubungan kota Palembang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh data yang mampu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi yang terjadi pada tempat unit penelitian. data yang digunakan primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penghambat parkir di tepi jalan umum pada dinas perhubungan kota Palembang terdiri dari faktor secara langsung dan tidak langsung yang meliputi sumber daya manusia, sistem pengendalian dan pengawasan, pembelakuan sanksi, sarana dan prasarana dan pelayanan operasional di lapangan.

Kata Kunci: faktor penghambat langsung dan tidak langsung

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan kebebasan setiap daerah untuk memajukan pembangunan daerahnya dalam mengelolah segala sumber daya yang ada di daerah tersebut. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memenuhi pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerah khususnya kota Palembang. Salah satu sumber pendapatan asli daerah kota Palembang adalah retribusi parkir yang termasuk ke dalam golongan retribusi daerah. Masalah utama yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menyebabkan ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan masih dominan.

Menurut undang-undang No. 33 tahun 2004 pada pasal 1 angka 18 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa. "pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Menurut Abdul Halim (2004:101) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang terdiri dari:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah

Undang-undang No 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus, disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan jasa tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu:

- a. Jasa umum

Jasa umum yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- b. Jasa usaha

Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

- c. Jasa perizinan tertentu

Jasa perizinan tertentu yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana dan

sarana, fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dalam rangka biaya penyelenggaraan pemerintah daerah adalah retribusi parkir di tepi jalan umum yang tergolong jasa umum. Pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum di kota Palembang di atur melalui peraturan daerah (Perda) No. 19 Tahun 2002. Menurut peraturan daerah (Perda) tersebut di atas menyatakan bahwa, "Retribusi parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah biaya yang dipungut atas pelayanan parkir.

Masalah utama yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah adalah terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menyebabkan masih tergantungnya pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam bentuk dana pembangunan. Dengan demikian, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan kemampuan semaksimal mungkin dalam menggali sumber daya yang potensial di daerahnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah tersebut.

Melihat letak, luas dan wilayah kota Palembang diharapkan pemerintah Kota Palembang khususnya dinas perhubungan (Dishub) dapat menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang khususnya pada retribusi parkir di tepi jalan umum. Dinas perhubungan (Dishub) kota Palembang sendiri



telah banyak membuat ketetapan/peraturan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu mengelola kegiatan-kegiatan seperti:

1. Parkir ditepi jalan umum
2. Pengujian kendaraan bermotor
3. Terminal
4. Jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan
5. Izin trayek
6. Pembinaan hubungan udara yaitu pos dan telekomunikasi

Dinas Perhubungan saat ini memiliki tiga ratus dua puluh satu titik parkir, tempat parkir berpotensi sekali dalam menambah kas suatu daerah khususnya daerah kota Palembang, tapi semakin meningkatnya jumlah titik parkir yang beraneka ragam yang ada di kota Palembang menimbulkan suatu fenomena bahwa setiap tingkat target yang hendak dicapai oleh dinas perhubungan tidak dapat terealisasi. berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi retribusi parkir di Tepi Jalan Umum.

Pada tahun 2004 Dinas Perhubungan (DISHUB) bekerja sama dengan pihak swasta dalam kerja sama itu terjadi penurunan pencapaian target 14% dari tahun sebelumnya, pada tahun 2005 sampai dengan pertengahan 2006 pihak Dinas Perhubungan berkerja sama lagi dengan pihak swasta namun persentase pencapaian target masih menurun, pada tahun 2007 pihak Dinas Perhubungan (DISHUB) tidak lagi melakukan kerja sama lagi dengan pihak swasta sehingga targetnya naik menjadi 8,60%.

Tabel I.1
Target dan Realisasi Retribusi kumulatif Parkir di Tepi Jalan Umum
Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Palembang
Tahun 2002-2007

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian(%)
2002	2.000.000.000	1.832.280.600	91,61
2003	2.752.000.000	2.335.880.350	84,88
2004	3.150.000.000	2.232.732.200	70,88
2005	5.036.000.000	2.488.959.200	49,42
2006	5.036.000.000	2.437.097.200	48,39
2007	3.250.000.000	1.852.068.000	56,99

Sumber: Dinas Perhubungan (DISHUB) Pemerintah Kota Palembang tahun 2002-2007

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tahun 2002 -2007 realisasi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Menurut pengamatan peneliti, menurunnya penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum disebabkan karena kurangnya pengawasan di lapangan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul: “ **Analisis Faktor Penghambat Penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah, apa yang menjadi hambatan dalam pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum?



C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui kendala atau hambatan dalam melakukan pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman dan wawasan penulis terutama mengenai hal-hal yang terkait mengenai retribusi parkir ditepi jalan umum pada Dinas Perhubungan (Dishub) pemerintah kota Palembang.

2. Bagi Dinas Perhubungan (Dishub) Pemerintah Kota Palembang

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau bahan evaluasi dan pertimbangan guna membuat kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang.

3. Bagi Almamater

Dari segi akademis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk bidang study yang sejenis bagi mahasiswa dan mahasiswi fakultas ekonomi di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul “Analisis Pengawasan Penerimaan Retribusi Terminal Dalam Rangka Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lahat” yang dilakukan oleh Melfi Gustriani (2006). perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan penerimaan pendapatan Retribusi Terminal pada DISPENDA Kabupaten Lahat dan bagaimana upaya DISPENDA Kabupaten Lahat agar penerimaan Retribusi Terminal meningkat dan pada akhirnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga meningkat. Dalam penelitian ini terdapat dua variable yang digunakan yaitu: pengawasan penerimaan retribusi terminal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer data sekunder. teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, bahwa faktor pengawasan diperlukan guna memperketat peraturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, analisis faktor penghambat merupakan salah satu dari faktor yang diperlukan guna meningkatkan pengawasan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang.



B. Landasan Teori

1. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah suatu pungutan daerah yang diberikan kepada masyarakat sebagai pembayaran disebabkan pemakaian atau karena memperoleh jasa dari pekerjaan, usaha milik daerah, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik jasa langsung maupun jasa yang diberikan secara tidak langsung.

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah menyatakan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2. Pengertian Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum

Salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka biaya penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang tergolong dalam jasa umum. Pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum di kota Palembang diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2002. Menurut peraturan Daerah (Perda) tersebut di atas menyatakan bahwa, "Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah biaya yang dipungut atas biaya parkir".

Menurut Peraturan Daerah (Perda) kota Palembang Nomor 19 Tahun 2002 berkaitan dengan retribusi parkir di Tepi Jalan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan pemerintah daerah, karena jalan menyangkut kepentingan umum, penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- b. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.
- c. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa angkutan laut, sungai, penyebrangan.
- d. Objek retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah, dibidang parkir
- e. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan parkir.
- f. Golongan Retribusi adalah retribusi parkir di tepi jalan umum yang termasuk golongan retribusi jasa usaha.
- g. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah pelayanan dan fasilitas yang di sediakan Pemerintah Daerah dibidang pelayanan parkir ditepi jalan umum.
- h. Tata cara penetapan dan besarnya tarif Retribusi yaitu penetapan retribusi berdasarkan surat pemberiaan tariff retribusi daerah dengan menerbitkan surat ketetapan retribusi daerah khusus bagi fasilitas parkir.

3. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang dikelola dan berasal dari potensi yang ada pada daerah tersebut. Dengan demikian tingkat kemampuan dan kemandirian suatu daerah sangat ditentukan oleh sejauh mana daerah itu mampu untuk merealisasikan segenap potensi Pendapatan Asli Daerahnya sehingga menjadi realisasi penerimaan daerah yang sangat dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, Karena tidak mungkin suatu daerah otonomi akan dapat berdiri kalau hanya mengandalkan dana penerimaan dari bantuan pemerintah pusat.

Peranan dan fungsi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu hal yang sangat mutlak yang harus dijadikan perhatian dan penanganan yang serius baik dalam pengelolaan maupun pengembangan sumber-sumber punggutannya. Jadi dengan telah dilaksanakannya otonomi daerah seluas-luasnya, kemandirian suatu daerah betul-betul dilaksanakan yang implementasinya diwujudkan dalam bentuk penyerahan kewenangan-kewenangan kepada daerah termasuk pengolahan dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan pengembangan Pendapatan Daerah (PATDA) pada umumnya.

4. Faktor Penghambat

Menurut Abdul Halim (2004:50-51), maka faktor penghambat terbagi kedalam beberapa katagori yaitu:

- a. Faktor penyebab langsung, dimaksudkan adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung terhadap pencapaian sasaran, oleh karena itu apabila faktor ini diatasi maka akan mempunyai pengaruh langsung terhadap pencapaian sasaran, faktor-faktor ini meliputi:
 1. Masih belum realitisnya di dalam pemungutan target pendapatan asli Daerah (PAD)
 2. Masih tingginya tingkat kebocoran dan kelolosan
- b. Faktor penyebab tidak langsung, dimaksudkan adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi secara tidak langsung terhadap pencapaian sasaran, namun akan mempunyai pengaruh kepada akibat yang disebabkan oleh faktor penyebab yang diatasi tersebut, faktor-faktor ini meliputi:
 1. Sistem penentuan target yang didasarkan pada data histories
 2. Belum efektifnya pemberlakuan sangsi
 3. Pelayanan operasional di lapangan masih belum dilaksanakan secara prima
 4. Terbatasnya sumber daya atau petugas pelaksana operasional di lapangan
 5. Adanya birokrasi dalam pelayanan pemungutan retribusi.
 6. Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional dilapangan
 7. Belum efektifnya sistim pengendalian dan pengawasan di lapangan.

5. Tujuan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Berdasarkan peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang pungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan parkir.

6. Pengertian Tarif

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:449) Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah.

7. Struktur dan Besarnya tarif retribusi

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemberian fasilitas tempat parkir adalah tarif yang ditetapkan baik di lokasi pusat kota maupun di luar pusat kota dan jenis kendaraan apapun maka tarif yang digunakan pun berbeda ini berdasarkan peraturan daerah no. 19 tahun 2002 yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

8. Objek, Subjek, dan Jenis-jenis Retribusi Daerah

a. Objek Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa, "Objek Retribusi adalah berbagai jenis-jenis tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.



b. Subjek Retribusi Daerah

Subjek Retribusi Daerah adalah orang pribadi maupun badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa yang telah disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dan juga melakukan pembayaran atas pemakaian jasa yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah itu sendiri.

c. Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 pasal 18 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis Retribusi berdasarkan jasanya terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Retribusi jasa Umum, adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Objek Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum.

Sesuai dengan Undang-undang 34 tahun 2004 pasal 18 ayat 3 huruf (a), retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria berikut ini:

- a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi

- c. jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum
- d. jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e. retribusi tersebut tidak berkepentingan dengan kebijakan nasional
- f. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan **efisien** serta merupakan suatu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g. pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 pasal; 2 ayat 2, sebagai berikut:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan persmpahan/Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak peta



j. **Retribusi Pengujian Kapal Perikanan**

Subjek Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum dapat ditetapkan menjadi wajib retribusi retribusi jasa umum, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa umum.

2. **Retribusi Jasa Usaha**, adalah retribusi yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta, objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi:
- a. pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
 - b. pelayanan oleh pemerintah Daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

Kriteria Retribusi jasa usaha berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 pasal 18 ayat 3 huruf b, adalah sebagai berikut:

1. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan.
2. jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau

dikuasadaerah yang belim dimanfaatkan oleh secara penuh oleh pemerintah Daerah.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001

Pasal 3 ayat 2,menjelaskan bahwa jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:

1. Retribusi pemakaman kekayaan daerah
2. retribusi pasar grosir dan pertokoan
3. Retribusi tempat pelanggan
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat khusus Parkir
6. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila
7. Retribusi penyedotan kakus
8. Retribusi rumah potong hewan
9. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
10. Retribusi Penyebrangan diatas air
11. Retribusi pengelolaan limbah cair
12. Retribusi penujalan produksi Usaha Daerah

subjek retribusi sjasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.subjek retribusi jasa usaha merupakan wajib retribusi jasa usaha yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa usaha.

3. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atau kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa retribusi perizinan tertentu ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria berikut ini:

- a. perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang di serahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam menyelenggarakan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negative dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak di biayai dari retribusi perizinan.

Jenis-jenis Retribusi perizinan berdasarkan peraturan daerah Nomor 66 Tahun 2001 pasal 4 ayat 2 adalah sebagai berikut:

1. Retribusi izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
3. Retribusi izin Bangunan
4. Retribusi Izin Trayek

5. Retribusi Pungutan administrasi (leges)

Subjek Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah Daerah. Subjek Retribusi perizinan tertentu, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi perizinan tertentu.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2002:29), jenis penelitian berdasarkan jenis data yang diteliti dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis yaitu:

1. Penelitian Opini

Penelitian opini adalah penelitian terhadap fakta yang berupa opini atau pendapat orang (responden).

2. Penelitian Empiris

Penelitian empiris adalah penelitian terhadap fakta empiris yang diperoleh berdasarkan observasi atau pengamatan.

3. Penelitian Arsip

Penelitian arsip adalah penelitian terhadap fakta yang tertulis (dokumen) atau berupa arsip data.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian arsip karena dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap fakta yang berupa dokumen atau arsip tentang retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Palembang yang beralamat di jalan Pangeran Sido Ing Lautan 35 Ilir Telp. (0711) 442547 Palembang 30146

C. Operasional Variabel

Operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau bagaimana variabel tersebut diukur.

Tabel III.1
Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Faktor Penghambat Lansung	faktor-faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung terhadap pencapaian sasaran, oleh karena itu apabila faktor ini diatasi maka akan mempunyai pengaruh langsung terhadap pencapaian sasaran.	<ul style="list-style-type: none"> - SDM - Sistem pengendalian dan Pengawasan
Faktor Penghambat Tidak Lansung	faktor-faktor yang dapat mempengaruhi secara tidak langsung terhadap pencapaian sasaran distribusi parkir.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberlakuan sangsi - Sarana dan Prasarana - Pelayanan operasional di lapangan masih belum dilaksanakan secara prima - Kurangnya aparat

Sumber: Penulis 2008

D. Data yang Diperlukan

Menurut P. Joko Subagio (2004:87), adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung tanpa perantara.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Data sekunder berupa wawancara dengan pimpinan atau karyawan Dinas Perhubungan (DISHUB) Pemerintah Kota Palembang yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Sedangkan data primer berupa:

1. Sejarah singkat Dinas Perhubungan (DISHUB) Pemerintah Kota Palembang
2. Struktur organisasi dan pembagian tugas
3. Peraturan Daerah (PERDA) tentang retribusi parkir di tepi jalan umum
4. Target dan realisasi penerimaan daerah dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 pada Dinas Perhubungan (DISHUB)
5. Wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan (DISHUB)

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut M. Iqbal Hasan (2002:17) teknik pengumpulan data terdiri dari:

1. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan langsung mengadakan Tanya jawab kepada obyek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari obyek yang diteliti.

2. Observasi

Observasi yaitu cara pengumpulan data dengan terjun langsung dan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada atau laporan data dari peneliti sebelumnya.

4. Kusioner

Kusioner yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan daftar isian terhadap objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah wawancara yaitu dengan Tanya jawab secara langsung kepada pimpinan atau karyawan yang dianggap dapat memberikan data atau informasi yang dibutuhkan.



F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Menurut Mudrajad Kuncoro (2003:124) menyatakan bahwa ada dua metode yang biasa digunakan dalam menganalisis data, yaitu:

1. Metode Kualitatif

Metode Kualitatif adalah metode analisis data yang tidak dapat diukur dalam angka.

2. Metode Kuantitatif

Metode Kuantitatif adalah metode analisis data yang dapat diukur dalam angka.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu dengan membandingkan teori-teori dengan praktek-praktek yang ada di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran singkat Dinas Perhubungan Kota Palembang

Berdasarkan peraturan daerah kota Palembang nomor 2 tahun 2001 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dians Daerah bahwa Dinas daerah yang ada di kota Palembang terdiri dari sembilas jenis, salah satunya adalah Dinas Perhubungan. Dinas perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah Daerah di bidang Perhubungan, yang diimoin oleh kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas dibantu oleh seorang wakil kepala dinas yang bertanggungjawab kepada kepala dinas.

Dinas perhubungan kota Palembang mempunyai tugas dalam melaksanakan kewenangan otonomi Daerah di bidang perhubungan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. pendapatan yang diterima oleh dinas perhubungan kota Palembang di peroleh dari tujuh jenis retribusi, salah satunya adalah retribusi parkir di tepi jalan umum. Retribusi parkir di tepi jalan umum merupakan bagian dari kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan fasilitas berupa tempat parkir sehingga terciptanya pelayanan transportasi yang aman, nyaman, lancar dan terjangkau dengan kapasitas yang memadai.

a. Visi Dinas Perhubungan kota Palembang

1. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan yang menunjang pembangunan.
2. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan serta mengembangkan manajemen kweselamatan perhubungan.
3. meningkatkan pembinaan sumber daya manusia yang kreatif dan proaktif untuk mengantisipasi perkembangan IPTEK.
4. menata kembali perundang-undangan sector perhubungan berkaitan dengan perkembangan lingkungan startegis.
5. mengembangkan budaya rasa memiliki pada masyarakat akan arti keselamatan fasilitas perhubungan.

b. Misi Dinas Perhubungan Kota Palembang

“Terwujudnya sarana prasarana dan fasilitas penyediaan jasa perhubungan yang mampu mendukung pertumbuhan pembangunan dan kepuasan pengguna jasa.”



2. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Palembang

a. Tujuan

1. mewujudkan pemerataan pelayanan perhubungan yang aman dan nyaman sesuai dengan kemampuan membayar masyarakat.
2. Mengupayakan merencanakan dan memfasilitasi pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas penunjang perhubungan kota Palembang.

b. Sasaran

yaitu “terciptanya pelayanan transportasi yang aman, nyaman selamat dan terjangkau dan kapasitas yang memadai sehingga menjamin mobilitas dan aksesibilitas orang, barang dan kendaraan kesegala pelosok kota Palembang.”

3. Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Palembang

a. Kewenangan

Pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor
- penyelenggaraan perpakiran kendaraan bermotor
- pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan

- perencanaan pengawasan pemindahan pengendalian, bimbingan keselamatan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang ASDP, perhubungan laut dan kereta api serta di bidang perhubungan udara dan Postel.

b. Tugas Pokok

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang perhubungan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Fungsi

1. merumuskan kebijakan teknis dibidang perhubungan yang sifatnya mendukung secara operasional kebijakan kota Palembang.
2. Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. melaksanakan pembinaan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)
4. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada wali kota tentang langka-langka dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya (Perhubungan).
5. mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsure Pemda dan instansi sertamasyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas pokok.

4. Struktur Organisasi dan Pembagian tugas

a. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang

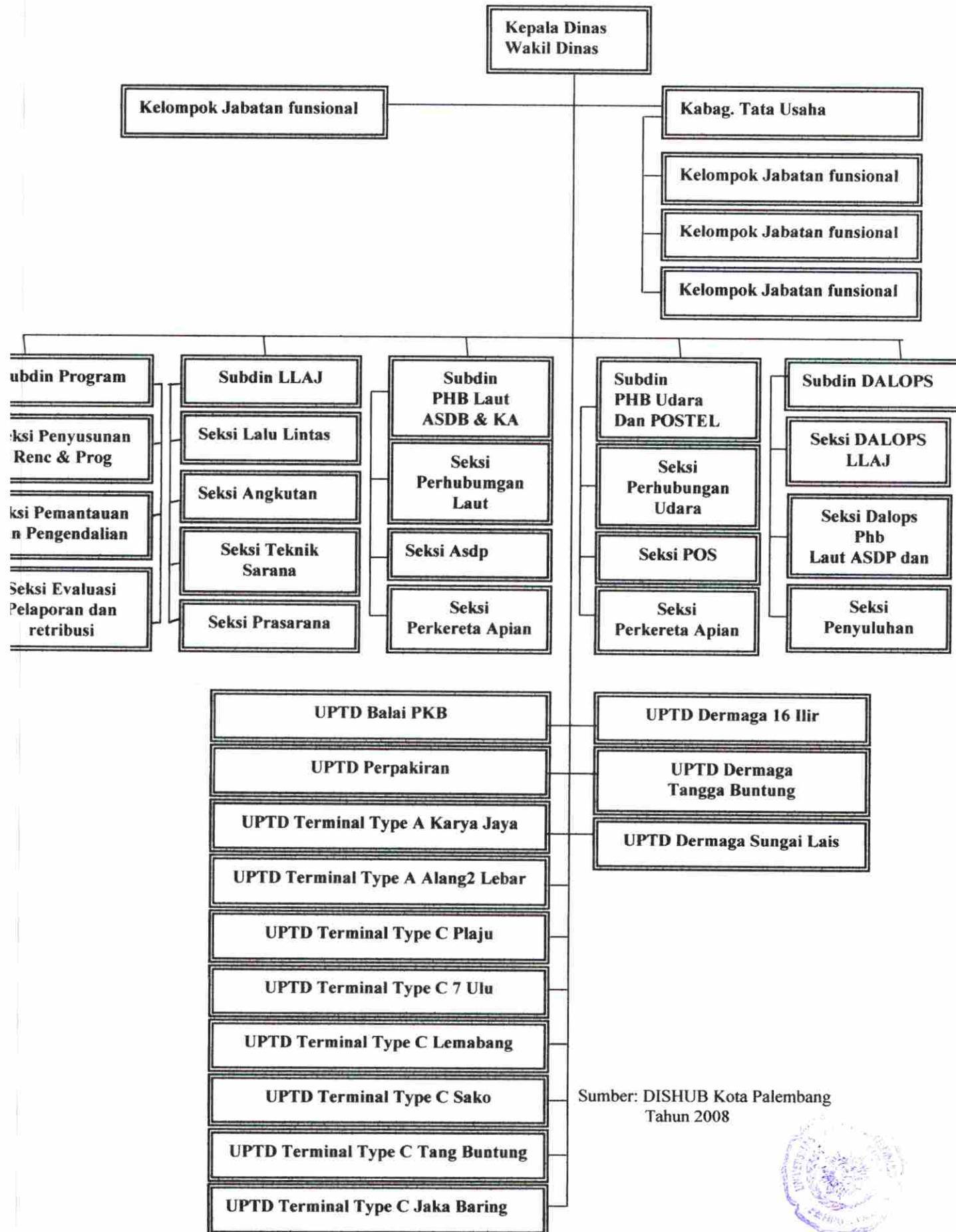
struktur organisasi menggambarkan susunan kerja yang disertai dengan pembagian tugas atau pembagian wewenang serta tanggung jawab secara formal dalam setiap fungsi organisasi. Struktur organisasi melukiskan interaksi kegiatan, peranan, hubungan, tujuan dan sifat-sifat organisasi lainnya, tetapi perlu diingat pula bahwa peranan struktur pada setiap organisasi ternyata berlainan dalam tingkat dan kualitasnya. Suatu struktur organisasi menunjukkan tugas dan wewenang atau tanggung jawab dari masing-masing pegawai agar tidak saling tumpang tindih.

Secara umum struktur organisasi yang digunakan dalam organisasi pemerintahan adalah struktur organisasi garis atau lini yang merupakan tipe organisasi yang tertua dan paling sederhana. Pada struktur organisasi ini wewenang puncak pimpinan mengatur bagian-bagian yang ada di bawahnya secara langsung, sehingga dapat mempermudah tujuan organisasi. Adapun pola struktur organisasi DISHUB pemerintah Kota Palembang yang diatur dalam peraturan daerah no 2 tahun 2001 yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Bagian Tata Usaha
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
4. Sub Dinas Program, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyusunan rencana dan program
 - b. Seksi pementauan dan pengendalian
 - c. Seksi evaluasi pelaporan dan retribusi
5. sub dinas lalu lintas dan angkutan jalan, terdiri dari:
 - a. Seksi lalu lintas
 - b. Seksi angkutan
 - c. Seksi teknik sarana
 - d. Seksi Prasarana
6. Sub Dinas Perhubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau, Penyebrangan dan Kereta Api terdiri dari:
 - a. Seksi perhubungan laut
 - b. Seksi Angkutan sungai, danau dan penyebrangan
 - c. Seksi Perkereta apian
7. Sub dinas Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari:

- a. Seksi perhubungan udara
 - b. Seksi pos
 - c. Seksi telekomunikasi
8. Sub dinas pengendalian operasional, terdiri dari:
- a. Seksi Penendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan.
 - b. Seksi pengendalian perhubungan laut, angkutan sungai danau penyebrangan dan kereta api.
 - c. Seksi pengendalian operasional perhubungan udara, pos dan telekomunikasi
 - d. Seksi penyuluhan
9. Cabang dinas terdiri dari:
- a. Kepala Cabang dinas
 - b. Unsur Staf/Petugas administrasi
 - c. Kelompok jabatan fungsional
 - d. Unsur lini/Petugas teknis operasional
10. Unit pelaksana teknis dinas, terdiri dari:
- a. Kepala
 - b. Unsur staf/petugas Administasi
 - c. Unsur lini/petugas teknis operasional
 - d. Kelompok jabatan fungsional
11. Kelompok Jabatan fungsional

Gambar IV. 1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan (DISHUB)
Pemerintah Kota Palembang



Sumber: DISHUB Kota Palembang Tahun 2008



B. Pembagian tugas

1. Kepala Dinas

bertugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang lalu lintas yang diberikan oleh pemerintah kota Palembang (WALIKOTA). kepala dinas mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang perhubungan dengan kebijaksanaan yang di gariskan oleh kepala daerah berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.
- b. Memimpin kegiatan dan urusan wakil kepala dinas, kepala bagian tata usaha, dan kepala-kepala sub dinas yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan tugas yang di berikan oleh pemerintah daerah.
- c. Merumuskan kebijaksanaan operasional pembangunan daerah di bidang pasar.
- d. Melaksanakan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan bantuan baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta.
- e. Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan unsure-unsur pemerintah daerah dan instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas pokok.
- f. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala daerah.

- g. Memberiakan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala daerah tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2. Wakil Kepala Dinas

membantu tugas-tugas kepala dinas membuat program kerja dinas perhubungan (DISHUB) jangka pendek, menengah, jangka panjang, memberikan saran /pertimbangan kepada kepala Dinas mengenai langka-langka dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang dan tugasnya .menjalankan tugas dan fungsi kepala dinas sehari-hari apabila kepala dinas berhalangan dan berada di luar daerah atau luar kota.wakil kepala dinas mempunyai fungsi:

- a. Membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- b. Mengkoordinir bagian tata usaha ,Sub Dinas,Cabang Dinas,unit pelaksana teknisdinas dan kelompok jabatan fungsional yang ada dalam lingkungannya dan bertanggungjawab atas kelancaran peleksanaan tugas tersebut.
- c. Memberikan saran atau pertimbangan kepada kepala dinas mengenai langka-langka dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- d. Menjalankan tugas dan fungsi kepala dinas berhalangan atau berada di luar daerah berdasarkan surat penunjukan kepala Daerah.
- e. Melaksanakan tugas-tugas khusus lainnya yang di berikan oleh kepala dinas.

3. Bagian Tata Usaha

bertugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas, pengolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, surat menyurat dinas, protokol, pembuatan laporan dinas serta hubungan masyarakat. bagian tata usaha mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaiannya.
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi hokum dan humas.
- d. Melaksanakan ketatausahaan dan kearsipan.

Bagian tata usaha terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas mengurus surat menyurat dan mengelola arsip.

b. Sub Bagian Kepegawaian

Mempunyai fungsi melakukan pengelolaan urusan kepegawaian

c. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

4. Sub dinas Program

melaksanakan pengelolaan keuangan kebutuhan dinas atau kantor.

Untuk meyenggarakan tugasnya Sub Dinas Program mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan pengumpulan pengelolaan data.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang perhubungan.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- d. Menyiapkan bahan pelaksana evaluasi pelaporan kegiatan dan mengelola retribusi di bidang perhubungan.

Sub dinas program terdiri dari :

- a. Seksi penyusunan rencana dan program
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan rencana program kegiatan bidang perhubungan.
- b. Seksi pemantauan dan pengendalian
mempunyai tugas melaksanakan pemantauan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan bidang perhubungan.
- c. Seksi evaluasi pelaporan dan retribusi
mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perhubungan serta kegiatan retribusi yang dilaksanakan oleh dinas perhubungan.



5. Sub Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sub dinas lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan manajemen lalu lintas, manajemen angkutan, prasarana serta keselamatan dan teknik sarana.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, sub Dinas lalu lintas dan Angkutan jalan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- b. Menyusun rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan.
- c. Penyusunan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- d. Menyusun rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana lalu lintas dan angkutan jalan

Sub Dinas Lalu Lintas dan angkutan Jalan terdiri dari:

a. Seksi Lalu Lintas

mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

b. Seksi Angkutan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberian izin dan penetapan trayek angkutan jalan, pengendalian angkutan, perumusan kebijakan angkutan dan bahan pembinaan pelaksanaan angkutan.

c. Seksi Prasarana

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan dan penyediaan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta bahan pemantauan dan analisis kinerja prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

d. Seksi Teknik Sarana

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan inventaris, pembinaan perbengkelan umum, penataan izin pendirian bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum, serta pembinaan terhadap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan ketentuan teknis dan lain jalan kendaraan.

6. Sub Dinas Perhubungan Laut, Angkutan Sungai Danau Penyebrangan (ASDP) dan Kereta Api

Sub Dinas Perhubungan Laut, Angkutan Sungai Danau Penyebrangan (ASDP) dan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, pembinaan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perhubungan laut, lalu lintas angkutan sungai danau penyebrangan dan kereta api.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Dinas Perhubungan Laut, Angkutan Sungai Danau Penyebrangan (ASDP) dan Kereta Api mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan lalu lintas sungai danau penyebrangan dan kereta api.
- b. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan angkutan laut, angkutan sungai, danau penyebrangan dan kereta api.
- c. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana perhubungan laut, angkutan laut, angkutan sungai danau penyebrangan dan kereta api.
- d. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi kegiatan untuk menunjang keselamatan lalu lintas laut dan angkutan sungai danau penyebrangan dan kereta api.

7. Sub Dinas Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi

Sub Dinas Perhubungan Udara, Pos dan telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, pembinaan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ke bandara udara dan angkutan udara serta penunjang pelaksanaan penerbangan pos dan telekomunikasi. Untuk menyelenggarakan tugasnya Sub Dinas Perhubungan Udara, Pos dan telekomunikasi mempunyai tugas:

- a. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ke bandara udara.
- b. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan angkutan udara serta menunjang keselamatan penerbangan.
- c. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan usaha jasa pos.
- d. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan jasa komunikasi.

Sub Dinas Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi terdiri dari :

a. Seksi Perhubungan Udara

mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan rekomendasi pembangunan di dalam bandara udara dan pemberian izin lokasi bandara udara serta melakukan penyiapan bahan pemberian rekomendasi penerbitan IMB bagi bangunan dalam

kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) serta pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan angkutan udara.

b. Seksi Pos

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan fialteli, izin jasa titipan dan bahan apembinaan kegiatan usaha jasa pos.

c. Seksi Telekomunikasi

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan izin penyelenggaraan instalasi, kabel rumah (IKRG), pengujian alat komunikasi dan bahan pembinaan kegiatan jasa usaha telekomunikasi.

8. Sub Dinas Pengendalian Operasional

Sub Dinas Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai, angkutan danau, penyebrangan, angkutan jalan rel, angkutan udara, pos dan telekomunikasi serta menyiapkan bimbingan keselamatan dan penertiban pada sector perhubungan.

Untuk penyelenggaraan tugasnya, sub dinas pengendalian operasional mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian lalu lintas, angkutan jalan, angkutan sungai, dan penyebrangan, angkutan jalan rel, angkutan udara, pos dan telekomunikasi.
- b. Penyusunan rencana pembinaan penegakkan hukum dibidang perhubungan.
- c. Penyusunan rencana pembinaan dan pemberian bimbingan serta penyuluhan kepada masyarakat dan memfasilitasi kegiatan bimbingan dan penyuluhan.
- d. Penyusunan rencana bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai, dan penyebrangan, angkutan jalan rel, pos dan telekomunikasi.

Sub Dinas Pengendalian Operasional Terdiri Dari:

- a. Seksi Pengendalian Operasional lalu lintas dan Angkutan jalan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan jalan.
- b. Seksi pengendalian operasional perhubungan laut, angkutan sungai danau penyebrangan dan kereta api.

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai danau penyebrangan dn kereta api.

- c. Seksi pengendalian operasional perhubungan udara, pos dan telekomunikasi. Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan keselamatan lalu



lintas angkutan udara serta kelamcaran pelaksanaan kegiatan pos dan telekomunikasi.

d. Seksi Penyuluhan

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat di bidang perhubungan.

9. Cabang Dinas

cabang dinas merupakan unsure pelaksana teknis operasional dinas.

Cabang dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugasnya , cabang dinas mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan unsure teknis operasional
- b. Melaksanakan urusan administrasi

susunan organisasi cabang dinas terdiri dari:

- a. Kepala cabang dinas
- b. Unsur lini / petugas teknis operasional
- c. Unsur staf / petugas administrasi
- d. Kelompok jabatan fungsional

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

unit pelaksanaan teknis dinas lalu lintas angkutan jalan kota Palembang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di satu atau beberapa wilayah kecamatan atau satu daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, unit pelaksanaan teknis dinas mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidangnya.
- b. Pelaksanaan urusan administrasi

susunan organisasi unit pelaksana teknis dinas terdiri dari:

- a. Kepala dinas
- b. Unsur lini / petugas teknis operasional
- c. Unsur staf / petugas Administrasi

11. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok jabatan fungsional di dalam lingkungan dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dinas sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
- b. Kelompok jabatan fungsional dapat ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- c. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

- d. Pembinaan terhadap tenaga fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
 - e. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada kepala dinas dan kepala unit pelaksana teknis dinas yang bersangkutan.
5. Pengelolaan Distribusi Parkir
- a. Pengelolaan retribusi parkir harus bertumpu pada kepentingan masyarakat
 - b. Kejelasan tentang misi pengelolaan retribusi parkir pada umumnya dan anggraan retribusi pada khususnya.
 - c. Desentralisasi pengelolaan retribusi parkir dan kejelasan peran partisipasi yang terkait dalam pengelolaan tersebut.
 - d. Pengelolaan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perubdabg-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarkat.

6. Data target dan realisasi retribusi parkir di tepi jalan umum

Tabel IV.1
Target dan Realisasi Retribusi kumulatif Parkir di Tepi Jalan Umum
Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Palembang
Tahun 2002-2007

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian(%)
2002	2.000.000.000	1.832.280.600	91,61
2003	2.752.000.000	2.335.880.350	84,88
2004	3.150.000.000	2.232.732.200	70,88
2005	5.036.000.000	2.488.959.200	49,42
2006	5.036.000.000	2.437.097.200	48,39
2007	3.250.000.000	1.852.068.000	56,99

Sumber: Dinas Perhubungan (DISHUB) Pemerintah Kota Palembang tahun 2002-2007

7. Tarif Retribusi Parkir Pada Kota Palembang

a. Dilokasi pusat Kota

1. Mobil barang dengan Kereta gandeng

dan kereta temple..... Rp. 7.000

2. Mobil Bis:

a. Mobil bis besar.....Rp. 2.500

b. Mobil bus sedangRp. 2.500

c. Mobil bus kecil Rp. 1.000

3. Mobil barang dengan tonase:

a. Mobil barang dengan tonase diatas

10 ton Rp. 4.000

b. Mobil barang dengan tonase

5 ton s/d 10 ton Rp. 3.000

c. Mobil barang dengan tonase

2 ton s/d 4 ton Rp. 1.000

d. Mobil tangki atau mobil box

besar Rp. 2.500

e. Mobil barang atau mobil box

kecil Rp. 1.500

4. Mobil penumpang sedan:

Pick-up dan sejenisnya Rp. 1.000

5. Kendaraan bermotor roda tigaRp. 750
6. Sepeda motorRp. 500
7. SepedaRp. 200

b. Dilokasi luar pusat kota

1. Mobil barang dengan kereta gandeng
dan kereta templeRp. 5.000
2. Mobil Bis:
 - a. Mobil bis besarRp. 1.500
 - b. Mobil bus sedangRp. 1.500
 - c. Mobil bus kecilRp. 500
3. Mobil barang dengan tonase:
 - a. Mobil barang dengan tonase diatas
10 tonRp. 5.000
 - b. Mobil barang dengan tonase
5 ton s/d 10 tonRp. 2.000
 - c. Mobil barang dengan tonase
2 ton s/d 4 tonRp. 1.000
 - d. Mobil tangki atau mobil box
besarRp. 2.500
 - e. Mobil barang atau mobil box
kecilRp. 1.500



- 3 Mobil penumpang sedan:
 - Pick-up dan sejenisnya Rp. 1.000
4. Kendaraan bermotor roda tigaRp. 150
5. Sepeda motorRp. 100
6. kendaraan moter beroda tiga.....Rp. 300

B. Pembahasan

Pembahasan pada bab IV ini dimaksudkan untuk menganalisis penerimaan Retribusi Parkir di tepi jalan umum terhadap Pendapatan Asli Daerah,serta apa yang menjadi hambatan dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kota Palembang yang berasal dari distribusi parkir di tepi jalan umum.adapun analisis faktor penghambat yang dilakukan dinas perhubungan kota Palembang untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah Kota Palembang adalahsebagai berikut:

1. Analisis faktor penghambat secara langsung yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam peningkatan penerimaan retribusi parkir, sumber daya manusia di sini yaitu aparat pemungut retribusi. Aparat pemungut retribusi hendaknya memiliki kemampuan yang mendalam mengenai permasalahan tugas yang mereka emban dengan sebaik mungkin, tanpa adanya pengaruh dari pihak-pihak yang lain.

Pada dinas perhubungan kota Palembang ini memiliki 11 areal parkir, 321 titik parkir, 526 juru parkir. Hambatan yang terjadi yaitu lemahnya pengawaasan dari SDM / aparat pelaksana operasional di lapangan, sehingga membuat adanya data yang diterima tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Dengan demikian menyebabkan pendapatan yang diterima dari retribusi parkir mengalami penurunan, karena adanya daerah yang tidak terjangkau atau terdata oleh dinas perhubungan kota Palembang siapa saja yang termasuk dalam juru parkir resmi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh dinas perhubungan kota Palembang. Hal ini tidak sebanding dengan objek yang ada, sehingga para wajib retribusi hanya melakukan pembayaran retribusi bila ada aparat pemungutan yang ada di lapangan, bila tidak maka aparat tidak akan melakukan pembayaran retribusi. Selain itu membuat banyaknya juru parkir yang illegal. Bila hal ini terus berlanjut maka akan dapat mengurangi pendapatan yang diperoleh dari retribusi parkir. Maka dari itu guna lebih meningkatkan pendapatan dari retribusi parkir, hendaknya pihak Dinas Perhubungan Kota Palembang untuk dapat meningkatkan jumlah aparat yang ada untuk setiap titik-titik parkir demi tercapainya peningkatan dari retribusi parkir itu sendiri, selain itu aparat pemungut retribusi hendaknya memiliki kemampuan yang mendalam mengenai permasalahan tugas yang mereka emban yaitu dalam hal pemungutan retribusi, sehingga dengan kemampuan yang dimiliki

aparat akan dapat melaksanakan tugas yang mereka embank dengan sebaik-baik mungkin, tanpa adanya pengaruh dari pihak-pihak yang lain. Cara nya dengan adanya pelatihan bagi aparat parkir.

b. Sistem Pengendalian dan Pengawasan

salah satu upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Palembang untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum yaitu pengawasan.kurangnya pengawasan dari aparat menyebabkan pendapatan yang diperoleh dari retribusi mengalami penurunan,agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif maka hendaknya DISHUB agar dapat lebih giat untuk mengadakan pengawasan dan pengendalian yang terdiri dari pwerencanaan, koordinasi, motivasi dan penilaian kinerja sebagai berikut:

1. Perencanaan

Dinas Perhubungan Kota Palembang sebelum melakukan pengawasan terlebih dahulu melakukan perncanaan mengenai perkiraan atau meramalkan berapa target Retribusi parkir di tepi jaluin umum yang akan ditetapkan setiap tahun nya dengan melakukan program-program dan penjadwaln kegiatan.meneliti apakah pungutan retribusi telah berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

2. Koordinasi

dalam koordinasi pengawasan yang dilakukan Dinas perhubungan Kota Palembang adalah dengan melakukan rapat yang dilakukan 3 bulan sekali untuk mempertanyakan mengenai target penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum apabila target penerimaan tersebut tidak tercapai.

3. Motivasi

Dinas perhubungan Kota Palembang melakukan motivasi dengan mengadakan penyuluhan dengan pemberian tunjangan upah kepada pemungut Retribusi parkir di tepi jalan umum guna meningkatkan penerimaan pendapatan retribusi parkir.

4. penilaian kinerja

pengawasan terhadap penilaian kinerja yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap para petugas parkir dengan menilai penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum, apabila target pemungutan tidak tercapai maka kinerja yang dilakukan oleh petugas tersebut tidak efektif.

Hambatan yang terjadi yaitu adanya pemungutan yang dilakukan oleh pihak lain (pihak pasar) karena lokasi titik parkir tersebut berada dikawasan pasar seharusnya pendapatan terhadap retribusi tersebut pemungutannya dilakukan oleh petugas sub dinas perhubungan. oleh karena itu untuk mengurangi penyimpangan yang terjadi hendaknya pihak DISHUB perlu meningkatkan dalam melakukan pengawasan dan

melakukan kesepakatan bersama dengan pihak terkait untuk mengurangi pungutan lain yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. pengawasan yang dilakukan secara rutin diharapkan dapat mengurangi penyimpangan-penyimpangan ataupun kebocoran retribusi parkir tersebut.

2. Analisis faktor penghambat secara tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan

a. Pembelakuan sanksi

sanksi administrasi kepada wajib retribusi parkir telah ditetapkan dalam peraturan daerah akan tetapi permasalahannya yang sering muncul adalah dalam pelaksanaan sanksi administrasinya yang dijatuhkan kepada wajib retribusi parkir masih kurang tegas banyak sekali para wajib-wajib retribusi parkir membayar biaya parkir kurang dari yang ditetapkan bersama.

hambatan kurangnya ketegasan petugas dalam memberikan sanksi sehingga masih banyak orang yang melanggar dalam membayar retribusi parkir.



b. sarana dan prasarana

sarana dan prasarana mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pendapatan retribusi parkir. Dengan cara antara lain memperluas lahan parkir dan meningkatkan keamanan di wilayah parkir, bila sarana dan prasarana yang disediakan dapat memenuhi kepuasan para wajib retribusi akan dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar retribusi. Hal ini terjadi karena adanya dampak yang dinikmati oleh wajib retribusi parkir yang selama ini mereka bayar. Sehingga para wajib retribusi parkir merasakan bahwa retribusi yang selama ini mereka bayar digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana guna memperlancar kegiatan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir.

Hambatan adanya penyempitan lahan yang disebabkan oleh adanya tempat parkir yang tidak aktif lagi sehingga parkir menggunakan bahu jalan yang mengakibatkan kemacetan.

c. Pelayanan operasional di lapangan masih belum dilaksanakan secara prima

1. penyesuaian / penyempurnaan administrasi pungutan

dalam hal ini lebih di ujikan pada kegiatan para pelaksana dan ketertiban administrasi serta apakah pungutan retribusi telah berdasarkan Undang-undang atau peraturan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

2. penyesuaian tarif

dalam hal ini besarnya tariff retribusi harus sesuai dengan prinsip dan sasaran yang dimaksud untuk menunjang penyelenggaraan pemberian pelayanan dan fasilitas tempat parkir di tepi jalan umum berdasarkan jenis dan klafikasinbya .tarif yang telah di tetapkan baik di lokasi pusat kota maupun di luar pusat kotadan jenis kendaraan apapun maka tarif yang digunakan berbeda,hal ini berdasarkan perda yang telah di tetapkan oleh pemerintah daerah

3. penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan

penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan dalam hal ini menitik beratkan pada melaksanakan pungutan dengan sasaran menyempurnakan system dan prosedur pungutan serta pembayaran dan peningkatan pelayanan yang cepat dan cermat kepada wajib retribusi.

Hambatan yang terjadi yaitu kurang efektifnya pemberlakuan sanksi khususnya masalah retribusi parkir di tepi jalan umum belum ditegakan dengan tegas,baik dalam administrasi ,tarif dan pelaksanaan pemungutan sehingga masih banyaknya pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang mengakibatkan realisasi, retribusi parkir yang ditetapkan tidak pernah mencapai target .kemudiaan dalam hal pemungutan masih

banyak penyimpangan seperti dalam hal pembayaran di mana retribusi parkir ini tidak dapat dihutangkan tetapi pada pelaksanaannya masih banyak di dalam pungutan tidak memberikan karcis kepada pengguna parkir sebagai bukti pembayaran yang sah terhadap retribusi parkir serta penyetoran terhadap penerimaan retribusi seringkali adanya penundaan penyeroran yang dilakukan oleh oknum-oknum juru parkir yang telah ditunjuk sebagai petugas yang mana oknum-oknum tersebut sering kali tidak mampu menyetorkan sepenuhnya yang mengakibatkan target/anggaran penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum tidak tercapai.

4. Kurangnya aparat

kurangnya aparat pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum yang ada di lapangan menyebabkan pendapatan yang diterima dari retribusi parkir mengalami penurunan, hal ini sebanding dengan objek yang ada sehingga para wajib retribusi hanya akan melakukan pembayaran retribusi. Bila hal ini terus berlanjut maka akan dapat mengurangi pendapatan yang diperoleh dari retribusi parkir di tepi jalan umum. maka dari itu guna lebih meningkatkan pendapatan dari retribusi parkir di tepi jalan umum hendaknya pihak DISHUB untuk dapat lebih

meningkatkan jumlah aparat yang ada untuk setiap titik parkir demi tercapainya peningkatan dari retribusi parkir itu sendiri.

Hambatan Kurangnya aparat pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum yang ada di lapangan menyebabkan pendapatan yang diterima dari retribusi parkir mengalami penurunan, karena adanya daerah yang tidak terjangkau atau terdata oleh dinas perhubungan kota Palembang siapa saja yang termasuk dalam juru parkir resmi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh dinas perhubungan kota Palembang. Hal ini tidak sebanding dengan objek yang ada, sehingga para wajib retribusi hanya melakukan pembayaran retribusi bila ada aparat pemungutan yang ada di lapangan, bila tidak maka aparat tidak akan melakukan pembayaran retribusi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor penghambat langsung dan faktor penghambat tidak langsung adalah sebagai berikut:

1. Faktor penghambat langsung

Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu Aparat pemungut retribusi hendaknya memiliki kemampuan yang mendalam mengenai permasalahan tugas yang mereka emban dengan sebaik mungkin, tanpa adanya pengaruh dari pihak-pihak yang lain. Sistem Pengendalian dan Pengawasan kurangnya pengawasan dari aparat menyebabkan pendapatan yang diperoleh dari retribusi mengalami penurunan, agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif maka hendaknya DISHUB agar dapat lebih giat untuk mengadakan pengawasan dan pengendalian yang terdiri dari perencanaan, koordinasi, motivasi dan penilaian kinerja.

2. Faktor Penghambat Tidak Langsung

Pembelakuan Sanksi kurangnya ketegasan petugas dalam memberikan sanksi sehingga masih banyak orang yang melanggar dalam membayar retribusi parkir. Sarana dan prasarana mempunyai peranan penting dalam



meningkatkan pendapatan retribusi parkir. Dengan cara antara lain memperluas lahan parkir dan meningkatkan keamanan di wilayah parkir. Pelayanan operasional di lapangan masih belum dilaksanakan secara prima.

- Penyesuaian / penyempurnaan administrasi pungutan
- Penyesuaian tariff
- Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan
- Kurangnya aparat

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencapai target yang diinginkan dalam penerimaan retribusi parkir harus dilakukan pembinaan mental budaya para petugas dan diharapkan dapat menghilangkan penyimpangan atau kebocoran seperti yang selama ini terjadi.
2. Sebaiknya dinas perhubungan kota Palembang dalam usaha meningkatkan penerimaan retribusi parkir petugas pemungut harus benar-benar handal dan kompeten kemudian memperbaiki sarana dan prasarana parkir serta melakukan pemberlakuan sanksi yang tegas kepada aparat yang tidak disiplin dan wajib parkir yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. **Kajian Penerimaan Daerah**, Manajemen Usahawan, Malang.
- Mariot P. Siahaan. 2005. **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, Penerbit Pt Raja Grafindo, Jakarta.
- Mudrajad Kuncoro. 2003. **Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi**, Penerbit PT.Aksara Pertama, Yogyakarta.
- Melfi Gustriani. 2006. **Analisis Pengawasan Penerimaan Retribusi terminal Dalam Rangka Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lahat.**
- M. Iqbal Hasan. 2002. **Pokok-pokok Statistik I**. Garafindo Offset, Jakarta.
- Nur Indrianto dan Bambang Sutomo. 2002. **Metodologi Penelitian**, BPFE. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang **Retribusi Daerah**
- Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.**
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.**
- Undang-undang nomor 34 tahun 2004 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**

BIODATA PENULIS

Nama : Moch. Agus Tria Subri

Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 21 Januari 1983

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Segaran Lr. Kebangkitan No. 121 Palembang

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Telpon : 0852 82832848

Nama Orang Tua:

1. Ayah : M. Ali Arfan

2. Ibu : Nyimas Maryati

Pekerjaan Orang Tua:

1. Ayah : PNS

2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang Tua : Jl. Sunan Giri RT. 02 Lebak, Provinsi Banten

Telpon : 0252 280189



Iskani dan Unggul

S E R T I F I K A T

Nomor : 1001/J-10/FE-UMP/VII/2008

Diberikan Kepada

M. Agus Trias

NIM : 222003199

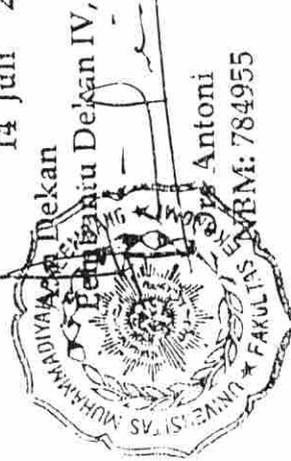
Jurusan : Akuntansi

Yang dinyatakan LULUS Membaca dan Hafalan Al-Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang

Dengan Predikat Memuaskan

Palembang, 11 Rajab 1429 H

14 Juli 2008 M





JURUSAN

JURUSAN MANAJEMEN (S1)
 JURUSAN AKUNTANSI (S1)
 JURUSAN PEMASARAN (D.II)

LIZIN PENYELENGGARAAN

No. 3450/D/T/2005
 No. 3449/D/T/2005
 No. 1611/D/T/2005

AKREDITASI

No. 015/BAN-PT/Ak-VII/S1/VII/2003 (B)
 No. 020/BAN-PT/Ak-IX/S1/IX/2005 (2)
 No. 003/BAN-PT/Ak-IV/Dpt-III/IV/2004 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu ☎ (0711) 511488 Facsimile 518018 Palembang 30263



LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Sabtu, 9 Agustus 2008
 Waktu : 13.00 WIB
 Nama : MOCH. AGUS TRIA SUBRI
 NIM : 22 2003 199
 Jurusan : Akuntansi
 Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Pemerintahan
 Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PALEMBANG

TELAH DISAHKAN DAN DISETUJUI OLEH PEMBIMBING DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA.

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1.	Mizan, SE. M.Si.	Pembimbing	15-08-2008	<i>[Signature]</i>
2.	M. Taufik Sya'insuddin, SE. Ak., M.Si	Ketua Penguji	17/08-08	<i>[Signature]</i>
3.	Rosalina Ghazali, SE. Ak. M.Si.	Anggota Penguji I		<i>[Signature]</i>
4.	M. Irfan Tarmizi, SE, Ak., MBA.	Anggota Penguji II	12-08-08	<i>[Signature]</i>

Palembang, Agustus 2008
 An. Dekan
 Ketua Jurusan Akuntansi



[Signature]
Drs. Sunardi, SE. M.Si.



KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN USULAN PENELITIAN



MASISWA : MOCH. AGUS TRIA. S **PEMBIMBING :**
22 2003 199 **KETUA :** MIZAN, SE. M.Si
AKUNTANSI **ANGGOTA :**

ULAN PENELITIAN : **ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DI
TEPI JALAN UMUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) DI KOTA PALEMBANG**

TGL/BULAN/TAHUN	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
13 - 5 - 2008	cep	f		Dari teori & p... Perbaiki lagi
14 - 5 - 2008	cep	f		Perbaiki lagi
15 - 5 - 2008	cep	f		Acc / seminar

Tanggal Seminar yang disepakati :

Dikeluarkan : Palembang
Pada Tgl.

a.n. Dekan
Ketua Jurusan Akuntansi



Sunardi, SE, M.Si

Mahasiswa Peserta Seminar
yang dibawa oleh Pemakalah

Nama Mahasiswa	NIM	Tanda Tangan
Lina Kurnia Widyanti	22.2003.095	[Signature]
Maryunani	22.2003.177	[Signature]
M. Haikal	22.2007.002	[Signature]
Maemunah	22.2004.166	[Signature]

Usulan Penelitian di Seminarikan setelah mendapat persetujuan dari Anggota dan Ketua Pembimbing
Kartu Bimbingan Skripsi akan diberikan setelah Seminar dan Perbaiki Usulan Penelitian.



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Pangeran Sido Iny Lautan 35 Ilir Telp. 442547 Palembang - 30146

Palembang, 23 Mei 2008

: 551/ 582/DISHUB/2008

Kepada

: Selesai Pengambilan Data

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Plg
di -

Palembang

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang, nomor : 855/G-17/FE-UMI/IV/2008, tanggal 29 April 2007 hal mohon bantuan data, dengan ini diinformasikan bahwa :

Nama : MOCH. AGUS TRIA S.
NIM : 22 2003 199
Jurusan : Akuntansi

telah selesai melaksanakan survey/pengambilan data di Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Demikian untuk dimaklumi.

A.N. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALEMBANG



MASRIK, SE, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 440 019 140



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Moch. Agus Tria Subri	PEMBIMBING
IRM/NIM : 222003199	Mizan, SE.MSI
JURUSAN : Akuntansi	

JUDUL SKRIPSI : Analisis Faktor Penghambat Penerimaan Retribusi Parkir Dit tepi Jalan Utama Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Palembang.

TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
11/7-08	Bab I s/d Bab III	PAK.		Perbaiki secara umum dan berikan daftar pustaka!
16/7-08	Bab I s/d Bab III	PAK.		Perbaiki lagi!
17/7-08	Bab I s/d Bab III	PAK.		see lampir Bab IV
17/7-08	Bab IV	PAK.		Perbaiki harus di lengkapi data yg cukup.
19-7-08	Bab IV	PAK.		Perbaiki lagi
21-7-08	Bab IV	PAK.		see lampiran Bab V & lengkapi Abstrak, dll
22-7-08	Bab V & Abstrak	PAK.		Perbaiki!
23/7-08	Bab V & Abstrak	PAK.		see 1/8 revisi!

DIPERIKSA OLEH:

Di ke uarkan di : Palembang
 Pada tanggal : 21/07/08

Disetujui oleh:
 Dekan
 Jurusan,
 [Signature]
 [Signature], SE.MSI

siswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, an terhitung sejak tanggal ditetapkan

